

Negara Sejahtera dan Batas Inklusivitas Pendidikan: Studi tentang Kerajaan Brunei Darussalam

Samsuddin Alamsyah¹, Achmad Uzair Fauzan²

¹²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

samsuddinalamsyah1357@gmail.com

Corresponding Author: Samsuddin Alamsyah Email: samsuddinalamsyah1357@gmail.com	Article history: Received: May 13, 2026 Revised: June 17, 2026 Available Online: July 20, 2026.
DOI: 10.64810/annuha.v13i1.1025	

Abstract

This study is motivated by an interest in examining social inequality within a relatively prosperous society such as the Sultanate of Brunei Darussalam. Widely recognized as a country with high per capita income and relatively comprehensive welfare services, Brunei nevertheless continues to face social challenges, particularly in relation to ethnic communities and other marginalized groups. The objective of this study is to analyze Brunei Darussalam's educational policy strategies and their relationship to addressing social inequalities experienced by marginalized communities within the country. This research employs a qualitative method using a library research approach through the analysis of formal literature and grey literature, particularly state documents concerning Wawasan Brunei 2035 and its implementation reports. The findings indicate that, on the one hand, the Brunei government has implemented comprehensive policies aimed at improving human resource quality and social mobility, including free education up to the university level, overseas scholarship programs, and the strengthening of curricula grounded in the values of Melayu Islam Beraja (MIB). In addition, labor market integration programs through JobCentre have been introduced to reduce unemployment. On the other hand, however, this study also identifies structural challenges in the form of unequal access for certain groups, policy biases toward ethnic minorities, and disparities between regions and educational quality. Therefore, although Brunei's educational policies possess significant potential to reduce social inequality, further evaluation and reform are required in order to create a more inclusive and equitable educational system.

Keywords: *Wawasan Brunei 2035, education policy, social inequality, marginal communities.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minat untuk menelusuri kesenjangan sosial dalam masyarakat yang relatif sejahtera seperti Kerajaan Brunei Darussalam. Dikenal sebagai negara pendapatan per kapita yang tinggi dan cakupan layanan kesejahteraan yang relatif komprehensif, Brunei ternyata juga menghadapi tantangan sosial terutama dalam hal relasi dengan komunitas etnis dan marjinal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi kebijakan pendidikan Brunei Darussalam dan keterkaitannya dengan penanganan isu kesenjangan sosial yang dialami oleh kelompok-kelompok marjinal di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis literatur formal dan *grey literature* terutama dokumen negara tentang Wawasan Brunei 2035 beserta laporan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada satu sisi, pemerintah Brunei telah mengimplementasikan kebijakan komprehensif dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosial, seperti pendidikan gratis hingga jenjang universitas, beasiswa luar negeri, dan penguatan kurikulum berbasis nilai Melayu Islam Beraja (MIB). Selain itu, terdapat program integrasi pasar kerja melalui *JobCentre* untuk menekan angka pengangguran. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan struktural berupa ketimpangan akses bagi kelompok tertentu, bias kebijakan terhadap etnis minoritas, serta kesenjangan antara wilayah dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, meskipun kebijakan pendidikan Brunei memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial, diperlukan evaluasi dan perbaikan agar tercipta sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Wawasan Brunei 2035, kebijakan pendidikan, kesenjangan sosial, komunitas marjinal.

PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial merupakan salah satu tantangan utama pembangunan modern karena dapat menghambat mobilitas sosial, memperlemah kohesi sosial, dan mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan sehingga diperlukan kebijakan publik yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya strategis, termasuk

pendidikan.¹ Di kawasan Asia Tenggara, persoalan kesenjangan sosial tetap menjadi perhatian meskipun sebagian negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam beberapa dekade terakhir.²

Dalam konteks tersebut, Brunei Darussalam menjadi kasus yang menarik untuk dikaji. Sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara, Brunei dikenal memiliki sistem kesejahteraan yang komprehensif, termasuk layanan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Melalui Wawasan Brunei 2035, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan mobilitas sosial, dan mendukung transformasi ekonomi nasional. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kelompok etnis minoritas, penduduk tetap (permanent resident), serta masyarakat di wilayah tertentu masih menghadapi keterbatasan akses dan kesempatan pendidikan yang berpotensi mereproduksi kesenjangan sosial.³

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan Brunei Darussalam dalam kerangka Wawasan Brunei 2035 serta menelaah sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi kesenjangan sosial yang dialami kelompok-kelompok marjinal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pendidikan, negara kesejahteraan, dan inklusivitas sosial dalam konteks Brunei Darussalam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih untuk mengkaji kebijakan pendidikan Brunei Darussalam dalam kerangka Wawasan Brunei 2035 serta hubungannya dengan persoalan kesenjangan sosial yang dialami kelompok-kelompok marjinal.⁴

Sumber data utama penelitian berupa dokumen resmi pemerintah Brunei Darussalam, terutama Wawasan Brunei 2035, laporan capaian pelaksanaannya periode 2015–2022, Manpower Blueprint, laporan pendidikan nasional, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya

¹ World Bank, *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality* (Washington DC: World Bank, 2016), 1–15; Leonid Grigoryev dan Vera Pavlyushina, “Relative Social Inequality in the World: Rigidity Against the Economic Growth, 1992–2016,” *Russian Journal of Economics* 5, no. 1 (2019): 46–66.

² Muhammad Taufiq Huq dan Masaru Ichihashi, “Can Historical Economic Growth Patterns Be Traced in South and Southeast Asian Countries as the Classical Theory Suggests?” *Journal of Economic Structures* 14, no. 11 (2025): 1–18; ASEAN, *Investing in ASEAN* (West Sussex: Allurentis, 2023).

³ H. Ho, “Culture, Education and Literature: How are the Chinese Faring in Brunei Darussalam?” *ARI Scope*, 9 Juli 2023; Hassan et al., “Education, Poverty and Social Mobility in Kampong Ayer,” 2024; Bernard Sercombe, “Language, Education and Minority Communities in Brunei Darussalam,” 2010.

⁴ Metode studi pustaka digunakan untuk menelaah dan mensintesis berbagai sumber tertulis yang relevan guna membangun analisis terhadap suatu persoalan penelitian. Lihat Barbara M. Wildemuth, *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science* (Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2017), 133–145.

manusia dan ketenagakerjaan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan data statistik pemerintah, laporan lembaga internasional, serta berbagai penelitian akademik yang membahas pendidikan, etnisitas, kewarganegaraan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di Brunei Darussalam.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses pengumpulan, seleksi, pengelompokan tema, dan interpretasi data. Analisis difokuskan pada identifikasi capaian kebijakan pendidikan Brunei Darussalam serta berbagai tantangan yang masih dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan akses pendidikan bagi kelompok etnis minoritas, penduduk tetap (permanent resident), non-citizen, dan masyarakat di wilayah pinggiran. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana kebijakan pendidikan Brunei berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial.

KAJIAN TEORI/PUSTAKA

Teori Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial merupakan kondisi ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, kesenjangan sosial muncul akibat adanya stratifikasi sosial yang membedakan individu berdasarkan status ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Robert M. Blackburn memperkuat konsep ini dengan mendefinisikannya sebagai suatu kondisi dimana individu ataupun kelompok dihadapkan akses yang tidak setara pada sumber daya, layanan, serta posisi yang bernilai di dalam masyarakat.⁵ Lebih lanjut, Blackburn menarasikan bahwa kesenjangan sosial bukanlah antonim dari kesetaraan, melainkan potret kontinum linier di mana kesetaraan hanyalah titik nol (titik awal) dari rentang ketidaksetaraan yang tak terhingga. Munculnya kesenjangan ini sangat dipengaruhi pada adanya perbedaan-perbedaan yang disepakati secara sosial di dalam struktur masyarakat tersebut.

Teori Pendidikan sebagai Mobilitas Sosial

Pendidikan dalam teori modernisasi dipandang sebagai sarana utama mobilitas sosial, di mana lembaga formal berfungsi sebagai inkubator meritokrasi yang mendistribusikan kesempatan secara adil berdasarkan kemampuan individu. Melalui pendidikan, individu memiliki kesempatan nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural, meningkatkan kualitas hidup, serta menaikkan status sosialnya di masyarakat. Robertson menegaskan bahwa investasi pada sektor pendidikan berperan signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.⁶ Dalam konteks

⁵ Robert M. Blackburn, "What Is Social Inequality?" *International Journal of Sociology and Social Policy* 28, no. 7–8 (2008): 250–259

⁶ Stephen L. Robertson, "Piketty, Capital and Education: A Solution to, or Problem in, Rising Social Inequalities?" *British Journal of Sociology of Education* 37 (2016): 823–835.

pembangunan nasional, keberadaan angkatan kerja yang terdidik dan terampil tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga memperkuat struktur kelas menengah yang stabil sebagai fondasi masyarakat modern.

Namun, fungsi pendidikan tidak boleh direduksi sekadar sebagai alat pemenuhan kebutuhan pasar kerja industri (*capitalist market*). Menurut Azyumardi Azra, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembentukan karakter individu secara holistik agar mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat secara bijaksana. Integrasi nilai-nilai humaniora dan lokal ini penting untuk mencegah terjadinya alienasi budaya di tengah arus modernisasi.⁷ Dengan demikian, fungsi pendidikan berjalan pada dua rel yang seimbang: ia tidak hanya berdampak secara ekonomi dalam melahirkan mobilitas vertikal, tetapi juga berdampak secara sosial dan kultural sebagai perekat solidaritas, penjaga moralitas, serta perawat identitas kolektif bangsa.

Teori Kebijakan Publik dalam Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan mengatur sistem pendidikan agar dapat mencapai tujuan nasional. Kebijakan yang baik harus berbasis pada kebutuhan masyarakat, bersifat inklusif, dan mampu mengurangi ketimpangan. Abdal menyatakan bahwa kebijakan merupakan hasil pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan pengalaman.⁸

Penelitian mengenai hubungan antara kebijakan pendidikan dan kesenjangan sosial telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Kesenjangan sosial dipandang sebagai persoalan global yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Leonid Grigoryev menunjukkan bahwa ketimpangan sosial memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi serta dapat menjadi pemicu instabilitas sosial.⁹

Dalam konteks pendidikan, Robertson menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan merupakan strategi paling efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁰ Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen mobilitas sosial yang memungkinkan individu meningkatkan status sosialnya.

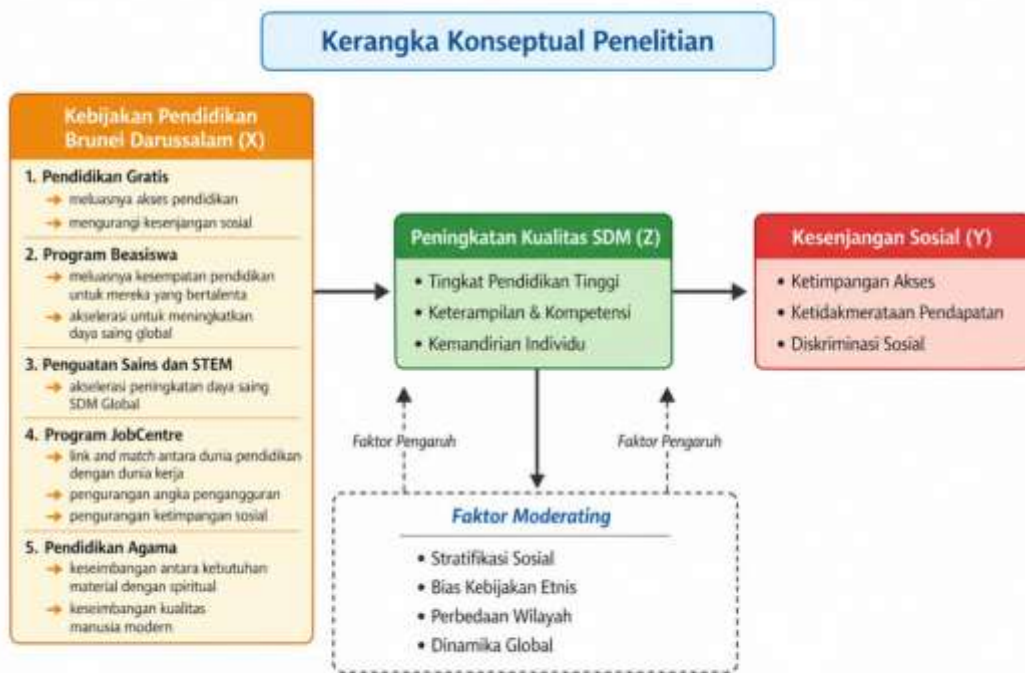
⁷ Azyumardi Azra. "Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi ditengah Tantangan Milenium III". Jakarta: Penerbit Kencana. (2019)

⁸ Abdal. *Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Widina Media Utama. (2025)

⁹ Leonid Grigoryev dan Vera Pavlyushina, "Relative Social Inequality in the World: Rigidity Against the Economic Growth, 1992–2016," *Russian Journal of Economics* 5, no. 1 (2019)

¹⁰ Stephen L. Robertson, "Piketty, Capital and Education: A Solution to, or Problem in, Rising Social Inequalities?" *British Journal of Sociology of Education* 37 (2016)

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Penelitian lain menunjukkan bahwa negara-negara maju memiliki sistem pendidikan yang kuat dan adaptif. Keberhasilan Singapura sebagai negara maju tidak terlepas dari kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan kesiapan menghadapi globalisasi.¹¹ Hal serupa juga ditemukan di Finlandia dan Jerman yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusif seperti pendidikan gratis dan sistem meritokrasi.¹² Brunei telah mengembangkan kebijakan pendidikan seperti pendidikan gratis, beasiswa, dan program ketenagakerjaan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

IDEOLOGI MELAYU ISLAM BERAJA, WAWASAN BRUNEI 2035, DAN PRIORITAS PENDIDIKAN

Dalam artikel berjudul "*Wawasan Brunei 2035: A National Narrative of Modernity in Traditional Normativity*", Pemerintah Brunei Darussalam

¹¹ Abiyyu Arhab Hanan, Gibran Andika Pratama, dan Taufik Muhtarom, "Perbedaan Sistem Pendidikan di Singapura dengan Indonesia Seiring Perkembangan Zaman," *JUPERAN: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 2 (2023)

¹² Rizki Ananda, Widia Intan Syaputri, Tari Suhesni, dan Nabillah Rossadah, "Perbandingan Pendidikan di Indonesia dan Pendidikan di Finlandia," *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 6689–6694.

¹³ Rose Patsy Tibok dan W. Hiew, "Higher Education Systems and Institutions: Brunei Darussalam," dalam *The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions* (London: Springer Nature, 2019).

mengadopsi pendekatan yang sangat selektif dalam merumuskan visi modernitasnya. Alih-alih mengadopsi modernisasi Barat secara utuh, Brunei melakukan kurasi ketat terhadap unsur-unsur global yang dianggap relevan dengan imajinasi masa depan negara tersebut tanpa menggerus identitas nasionalnya.¹⁴ Melalui visi tersebut, pendidikan Islam direkonstruksi bukan sekadar sebagai instrumen ritual ke22an, melainkan sebagai fondasi strategis yang memfilter pengaruh eksternal sekaligus memperkokoh ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) di tengah arus globalisasi. Dengan mensinergikan kompetensi teknokratis dan ketahanan spiritual dalam sistem pendidikan, Brunei berupaya memanifestasikan modernitas yang unik: sebuah kemajuan material yang tidak tercerabut dari akar identitasnya, melainkan tetap berpijak secara kokoh pada nilai-nilai keislaman sebagai kompas pembangunan bangsa yang stabil dan berkelanjutan. Visi pendidikan yang berlandaskan pada ideologi Melayu Islam Beraja yang dipadu dengan kesiapan menghadapi tantangan jaman itu dirumuskan dalam Wawasan Brunei 2035.

Wawasan Brunei 2035 merupakan visi jangka panjang Kesultanan Brunei Darussalam yang menjadi arah besar pembangunan negara menuju tahun 2035. Dokumen ini lahir dari proses perencanaan pembangunan jangka panjang yang dimulai pada tahun 2004 melalui pembentukan Badan Perencana Kemajuan Jangka Panjang, lalu diluncurkan secara resmi pada tahun 2008 sebagai visi nasional Brunei. Dalam konteks kebijakan Kesultanan, Wawasan Brunei 2035 adalah dokumen strategis yang sangat penting karena menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan negara. Ia bukan hanya memuat cita-cita pembangunan, tetapi juga membingkai bagaimana Brunei ingin menjaga kesejahteraan rakyat, mempertahankan keamanan dan kedamaian, serta memastikan masa depan negara tetap terjamin.¹⁵

Secara umum, Wawasan Brunei 2035 bertujuan menjadikan Brunei Darussalam dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang maju dan sejahtera. Visi ini dirumuskan ke dalam tiga matlamat utama, yaitu: pertama, rakyat yang berpendidikan, berketrampilan tinggi, dan maju; kedua, kualitas kehidupan rakyat yang tinggi; dan ketiga, ekonomi yang dinamik dan berkelanjutan. Ketiga matlamat ini menunjukkan bahwa pembangunan Brunei tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai pembangunan manusia, kesejahteraan sosial, nilai kebangsaan, dan ketahanan negara. Dengan demikian, Wawasan Brunei 2035 menjadi kerangka pembangunan yang menyatukan pendidikan, kualitas hidup, dan ekonomi dalam satu arah kebijakan nasional.

¹⁴ Suyanti Adi Pawiro, "Wawasan Brunei 2035: A National Narrative of Modernity in Traditional Normativity," 2020.

¹⁵ Sekretariat Tetap Wawasan Brunei 2035, *Wawasan Brunei 2035: Wawasan Negaraku* (Bandar Seri Begawan: Sekretariat Tetap Wawasan Brunei 2035, 2020).

Perhatian pada pendidikan termaktub dalam matlamat pertama yang menekankan pentingnya mewujudkan rakyat yang berpendidikan, berketrampilan tinggi, dan maju. Dalam dokumen ini, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian akademik, tetapi juga sebagai pembentukan sumber daya manusia yang mampu menyumbang pada pembangunan negara. Rakyat, khususnya pemuda (*belia*), diharapkan memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, tenaga profesional, ekonomi, keusahawanan, serta ketrampilan seperti komunikasi, kemampuan berbagi gagasan, dan kerja sama. Dengan kualitas tersebut, generasi muda tidak hanya dipersiapkan untuk berhasil secara pribadi, tetapi juga untuk menjadi tenaga penggerak kemajuan Brunei. Terlebih lagi dalam *Manpower Blueprint* bagi negara Brunei Darussalam ditegaskan bahwa akses yang sama rata dan saksama kepada pendidikan dan latihan yang berkualitas.¹⁶ Sayangnya, dalam dokumen Wawasan Brunei 2035 dan Manpower Blueprint tidak disebutkan persoalan kelompok etnis minoritas, kelompok atau golongan marjinal meski persoalan etnis minoritas sudah banyak disebut oleh berbagai riset.¹⁷

Dalam laporan pencapaian Wawasan Brunei 2035 untuk periode 2015-2022 disebutkan bahwa strategi pemenuhan matlamat pertama difokuskan pada lima program utama. Kelima program tersebut adalah pemerinkatan global prestasi siswa dalam ranking PISA (*Program for International Student Assessment*), peningkatan prestasi belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, peningkatan ranking universitas dalam *QS World University ranking*, penyesuaian pendidikan vokasi dan teknik yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan industri, dan pengenalan program *reskilling* dan *upskilling* untuk keperluan industri.¹⁸

Kaitannya dengan ranking PISA, prestasi pendidikan Brunei berada pada level menengah atas di kawasan ASEAN (lihat Tabel 1). Dengan skor 442 untuk matematika, 429 untuk membaca, dan 446 untuk sains, Brunei berada di bawah Singapore dan Vietnam, tetapi masih unggul dibandingkan Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina pada hampir seluruh kategori. Keunggulan Brunei paling terlihat pada bidang sains yang memperoleh skor tertinggi dibandingkan dua bidang lainnya, menunjukkan kapasitas pendidikan sains yang relatif kuat. Selain itu, perbedaan skor yang tidak terlalu jauh antarbidang mengindikasikan adanya pemerataan kualitas pembelajaran.

Melihat peringkat Brunei dalam ranking PISA yang secara komparatif lebih baik dibanding mayoritas negara ASEAN lainnya, terlihat bahwa

¹⁶ Ministry of Education (MOE) dan Manpower Planning and Employment Council (MPEC), *Manpower Blueprint Bagi Negara Brunei Darussalam* (Bandar Seri Begawan: Ministry of Education, 2023).

¹⁷ N. H. Hassan et al., "Administering and Encountering the Poor: Poverty from Above and Below in Brunei Darussalam," *Singapore Journal of Tropical Geography* 45, no. 2 (2024): 311–331.

¹⁸ Majlis Tertinggi Wawasan Brunei, *Laporan Wawasan Brunei 2035: 2015–2022* (Bandar Seri Begawan: Majlis Tertinggi Wawasan Brunei, 2023).

kebijakan Brunei diarahkan untuk mengikuti tren pendidikan global yang memberi perhatian pada pendidikan dan penelitian sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) yang menekankan peningkatan daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Meski demikian, Brunei menghadapi persoalan dalam hal terjadinya tren penurunan jumlah siswa jurusan sains yang masuk ke Sekolah Menengah 4 (Kelas 10) yang mencapai rata-rata sekitar 2% per tahun selama 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kecenderungan siswa untuk lebih banyak terwakili di jurusan seni dan kurang terwakili di jurusan sains. Bagi Brunei, ini merupakan masalah yang sangat serius.²⁰ Diestimasi bahwa sistem yang ada tidak akan mampu memenuhi permintaan dan penawaran kebutuhan lokal, dan banyak pekerjaan profesional tingkat tinggi di bidang sains masih akan dipegang oleh warga negara asing bahkan pada tahun 2011.²¹

Tabel 1. Perbandingan Skor PISA Negara-Negara ASEAN (2022)

<i>Negara</i>	<i>Skor PISA Matematika</i>	<i>Skor PISA Membaca</i>	<i>Skor PISA Sains</i>
<i>Singapura</i>	575	543	561
<i>Brunei</i>	442	429	446
<i>Malaysia</i>	409	388	416
<i>Thailand</i>	394	379	409
<i>Indonesia</i>	366	359	383
<i>Vietnam</i>	469	462	472
<i>Filipina</i>	355	347	356
<i>Kamboja</i>	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Laos</i>	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Myanmar</i>	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Timor-Leste</i>	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: OECD, *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education* (Paris: OECD Publishing, 2023).

- Catatan: n.a. = data tidak tersedia karena negara tidak berpartisipasi dalam tes.

Selain ranking PISA, perhatian Pemerintah Brunei dalam bidang pendidikan juga terlihat dari layanan pendidikan gratis dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi.²² Dengan menekankan pada pendidikan agama Islam yang diwajibkan hingga akhir sekolah dasar untuk memastikan anak-anak

¹⁹ Brigid Freeman, Simon Marginson, dan Russell Tytler, "An International View of STEM Education," dalam *Myths and Truths: What Has K-12 STEM Education Research Taught Us?*, ed. Alpaslan Sahin dan Margaret J. Mohr-Schroeder (Leiden: Brill, 2019), 350–363.

²⁰ Ahmad-Jumat, *Science Education in Brunei Darussalam* (Bandar Seri Begawan: Ministry of Education), 7.

²¹ Sharifah Maimunah Syed Zin, *Current Trends and Main Concerns as Regards Science Curriculum Development and Implementation in Selected States in Asia* (Bangkok: UNESCO, 1999).

²² Rose Patsy Tibok dan W. Hiew, "Higher Education Systems and Institutions: Brunei Darussalam," dalam *The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions* (London: Springer Nature, 2019).

mendapatkan pendidikan spiritual²³ dan sesuai dengan ideologi .Kebijakan tersebut membuka kesempatan secara luas kepada seluruh warga negara untuk memaksimalkan kompetensinya yang diharapkan bisa menjadi wasilah meraih kesejahteraan. Di samping itu, Pemerintah Brunei Darussalam juga menawarkan berbagai kesempatan beasiswa kepada warganya untuk belajar di luar negeri.²⁴ Dengan perhatian yang besar pada bidang pendidikan ini tidak mengherankan apabila Brunei juga menunjukkan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (lihat Tabel 2 berikut).

Tabel 2. Komparasi skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Brunei dan alokasi anggaran negara untuk pendidikan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN

Negara	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023/2024	Peringkat Dunia	Alokasi Pendidikan (% dari PDB)	Keterangan Anggaran
Singapura	0.949	9	2.5%	Fokus pada efisiensi & kualitas guru.
Brunei Darussalam	0.823	55	4.4%	Sangat tinggi; mencakup beasiswa penuh.
Malaysia	0.807	63	3.9%	Fokus pada digitalisasi pendidikan.
Thailand	0.803	66	3.1%	Mengalami tren penurunan alokasi.
Vietnam	0.726	107	4.1%	Alokasi tinggi dibanding PDB-nya.
Indonesia	0.713	114	3.0% - 3.3%*	Konstitusi mewajibkan 20% dari APBN.
Filipina	0.710	113	3.2%	Fokus pada akses pendidikan dasar.
Laos	0.620	139	2.1%	Salah satu yang terendah di regional.
Kamboja	0.600	148	2.6%	Terus meningkat pasca-pandemi.
Myanmar	0.591	149	1.8%	Terhambat oleh ketidakstabilan politik.
Timor Leste	0.566	155	5.4%	Persentase tinggi karena PDB masih kecil.

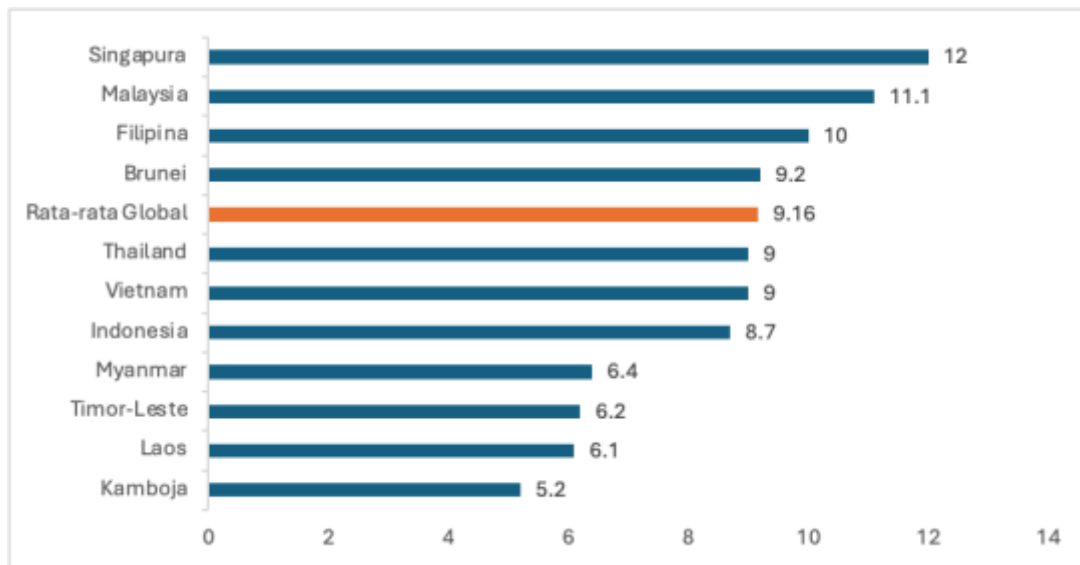
Sumber: Diolah dari UNDP Human Development Report 2023/2024 dan World Bank Data (Tahun rujukan).

²³ Young, *Islamic Education and Nation Building in Brunei Darussalam* (2017).

²⁴ Rose Patsy Tibok dan W. Hiew, “Higher Education Systems and Institutions: Brunei Darussalam,” dalam *The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions* (London: Springer Nature, 2019).

Dukungan Pemerintah pada partisipasi pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi berdampak secara khusus pada komponen rata-rata lama pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dengan menggunakan data UNDP seperti dalam grafik di bawah ini, Brunei berada pada posisi keempat di antara negara-negara ASEAN dengan rata-rata lama sekolah 9,2 tahun, sedikit di atas rata-rata global 9,16 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan Brunei relatif baik dan sudah melampaui standar global, meskipun jaraknya sangat tipis. Dibandingkan negara-negara dengan pencapaian tertinggi seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, Brunei masih memiliki banyak peningkatan, terutama untuk perluasan partisipasi pendidikan hingga jenjang menengah atas atau pendidikan lanjutan. Namun, posisi Brunei tetap cukup kuat karena berada di atas Thailand, Vietnam, Indonesia, dan negara ASEAN lain di bawahnya. Dengan demikian, Brunei dapat dipandang sebagai negara dengan pencapaian pendidikan menengah atas yang stabil, namun belum termasuk kelompok terdepan di kawasan ASEAN.

Grafik 1. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Negara ASEAN dan Rata-Rata Global



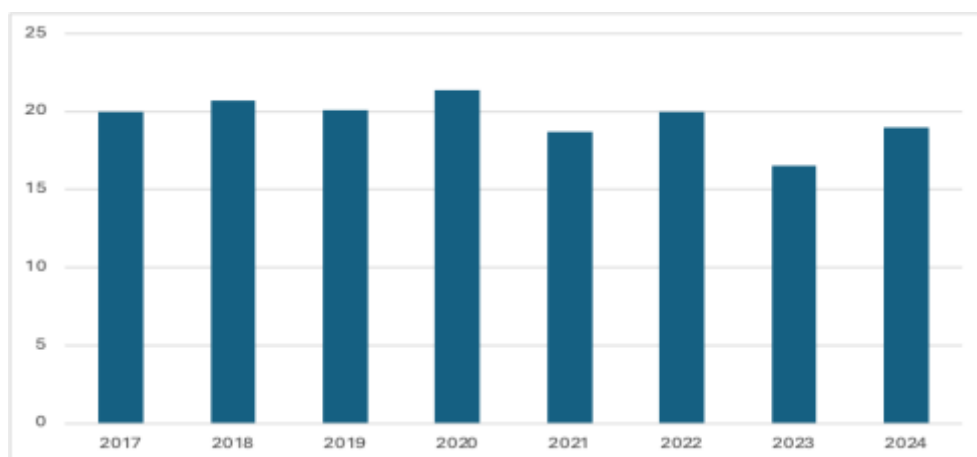
Sumber: UNDP, Human Development Report (2025)

Selain meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi, Brunei juga berupaya memperkuat kualitas institusi pendidikannya di tingkat internasional. Laporan mencatat adanya peningkatan posisi beberapa universitas Brunei dalam QS World University Rankings dan QS Asia University Rankings. Peningkatan peringkat ini dipandang sebagai indikator keberhasilan upaya universitas-universitas lokal dalam memperbaiki kualitas akademik, penelitian, dan reputasi internasional. Pemerintah menilai capaian tersebut penting untuk mendukung ambisi Brunei menjadi negara dengan sistem pendidikan berstandar global. Laporan itu menyebutkan bahwa

dua universitas Brunei, yaitu Universitas Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei, masuk dalam 350 besar dunia, masing-masing berada pada urutan ke-250 dan 344. Di tingkat Asia Tenggara, Universiti Brunei Darussalam berada di peringkat ke-4 setelah National University of Singapore, University of Malaya, dan Universitas Gadjah Mada.

Meski laporan PISA Brunei Darussalam di kancan ASEAN terbilang mengagumkan serta rata-rata lama sekolah Brunei Darussalam mampu bersaing di ranah global, laporan juga mengidentifikasi tantangan berupa tingginya kelompok pemuda *NEET* (*Not in Employment, Education or Training*), terutama mereka yang hanya memiliki pendidikan menengah. Karena itu, Brunei menekankan pentingnya keterhubungan yang lebih kuat antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan pasar kerja agar pembangunan sumber daya manusia dapat benar-benar mendukung transformasi ekonomi negara menuju 2035. Persoalan tingginya kelompok pemuda NEET tersebut disinggung dalam laporan pencapaian Wawasan Brunei 2035 untuk periode 2015-2022. Laporan itu menyebutkan bahwa pada tahun 2021 tingkat pengangguran usia 15-24 tahun di Brunei Darussalam merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara mencapai 23.0%, meski angka ini membaik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 25.8%.²⁵

Grafik 2. Proporsi pemuda NEET Brunei Darussalam



Sumber: Worldbank (2025)

Perhatian pada tingginya angka NEET ini tidak terlepas dari persoalan pengangguran secara umum yang terjadi di Brunei. Dari 5 negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di ASEAN (Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Indonesia), Brunei Darussalam merupakan negara dengan tingkat pengangguran yang tertinggi mencapai sebesar 7,48%.²⁶

²⁵ Majlis Tertinggi Wawasan Brunei, *Laporan Wawasan Brunei 2035: 2015–2022* (Bandar Seri Begawan: Majlis Tertinggi Wawasan Brunei, 2023). hlm. 38

²⁶ Ghifari Dimas Bayu Patra, Nuraini, I., & Fudin, MK. “Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Beberapa Negara ASEAN”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6(3) (2022): 409-420

Untuk mengatasi persoalan pengangguran tersebut, laporan pelaksanaan Wawasan Brunei 2035 juga menekankan pentingnya transformasi TVET (*Technical and Vocational Education Training*) melalui beberapa strategi, seperti restrukturisasi program studi, perluasan skema magang (*apprenticeship*), peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan penguatan kerja sama dengan industri. Pemerintah berharap sistem vokasi tidak lagi dipandang sebagai jalur pendidikan kelas dua, melainkan sebagai jalur strategis untuk menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja. Selain itu, Brunei memperkenalkan berbagai program reskilling dan upskilling untuk menyesuaikan kemampuan tenaga kerja dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi baru (lihat Tabel 3 di bawah berikut). Dalam bidang penempatan tenaga kerja, laporan menyoroti pentingnya meningkatkan employability lulusan pendidikan tinggi dan vokasi. Pemerintah mengembangkan berbagai program seperti *i-Ready*, pelatihan keterampilan di bawah *JobCentre Brunei*, dan program pengembangan pemuda untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesiapan kerja generasi muda.

Tabel 3. Ragam Kebijakan Pemerintah Brunei Atasi Pengangguran

No	Nama Kebijakan	Deskripsi Strategis	Sumber
1	i-Ready Apprenticeship Program	Program magang nasional 18 bulan untuk lulusan perguruan tinggi (Diploma, Degree, Master/PhD) guna meningkatkan kesiapan kerja melalui pelatihan praktis di sektor publik dan swasta.	MPEC Secretariat (2024). <i>Empowering Local Talent: The i-Ready Apprenticeship Framework</i> . Prime Minister's Office Brunei.
2	Manpower Planning and Employment Council (MPEC)	Lembaga pusat di bawah Jabatan Perdana Menteri yang menyelaraskan pasokan tenaga kerja (pendidikan) dengan permintaan pasar (industri) melalui portal JobCentre Brunei.	Department of Economic Planning and Statistics (2024). <i>Labour Force Survey Report 2023</i> . Ministry of Finance and Economy Brunei.
3	Economic Blueprint 2025	Strategi diversifikasi ekonomi untuk memperkuat lima sektor prioritas (Minyak & Gas hilir, Makanan, Pariwisata, Info-Komunikasi, dan Jasa Keuangan) demi menciptakan lapangan kerja non-pemerintah.	Ministry of Finance and Economy (2025). <i>Brunei Darussalam Economic Blueprint: Towards a Dynamic and Sustainable Economy</i> . MoFE Publications.

4	Bruneisation & LBD Policy	Regulasi ketat bagi perusahaan di Brunei (khususnya sektor energi) untuk memprioritaskan rekrutmen warga lokal dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja ekspatriat.	G. C. Gunn (2021). <i>Brunei Darussalam: The State of the Nation.</i> ISEAS – Yusof Ishak Institute (SouthEast Asian Affairs).
5	SkillsPlus & TVET Transformation	Program pendanaan bagi pekerja lokal untuk mengambil kursus peningkatan keterampilan (<i>upskilling</i>) dan pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan.	H. Haris & A. Bandial (2022). <i>Education-Industry Linkages in Brunei: A TVET Perspective.</i> Emerald Insight / Journal of Education and Work.

Sumber: diolah dari berbagai sumber seperti dikutip di kolom paling kanan

STRUKTUR SOSIAL, KESENJANGAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN

Demografi dan stratifikasi sosial di Brunei Darussalam

Gambar 2. Peta Brunei di Kawasan Nusantara dan Berdasarkan Distrik



Sumber: Gemini AI. (2026). Brunei dalam Frame Nusantara: Sebuah Permata di Jantung Borneo.

Seperti yang terlihat dalam peta di atas, Brunei terbagi ke dalam 4 wilayah yaitu Brunei Muara, Tutong, Belait, Temburong. Distrik Brunei Muara adalah yang terkecil dari keempat distrik tersebut dalam hal luas lahan absolut. Namun, meskipun ukurannya kecil, distrik ini memiliki konsentrasi populasi terbesar di negara ini, selain mengkonsolidasikan sebagian besar pusat administrasi dan ekonomi utama, pusat transportasi, kantor pusat komersial dan keuangan, serta pusat budaya dan sejarahnya. Distrik ini juga merupakan tempat ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan (BSB) berada.²⁷ Lebih lanjut distrik Temburong di Brunei saat ini tidak terhubung oleh jaringan infrastruktur apa pun ke seluruh negeri. Wilayah Temburong dan Belait adalah wilayah tempat tinggal kelompok etnis minoritas seperti Iban, Penan, Kampung Ayer dengan akses infrastruktur paling lemah.

Tabel 4. Klasifikasi penduduk Brunei Darussalam berdasarkan etnisitas

Etnisitas	Jumlah Penduduk	Persentase
Melayu	337.200 jiwa	73,5%
China	44.500 jiwa	9,7%
Ras lainnya	76.900 jiwa	16,8%
Total	458.600 jiwa	100%

Sumber: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam (Proyeksi/Estimasi Penduduk).

Dalam statistik Brunei, kelompok-kelompok etnis minoritas tersebut umumnya digolongkan ke dalam kategori “ras lainnya”, seperti terlihat pada Tabel 4 di atas. Tabel tersebut menyajikan perbandingan kelompok etnis di Brunei dengan Melayu sebagai mayoritas penduduk di Brunei Darussalam dengan proporsi sekitar 73,5% dari total populasi nasional. Kelompok etnis China menjadi minoritas terbesar kedua dengan persentase sekitar 9,7%. Sementara itu, jumlah populasi kategori “ras lainnya” tercatat hampir dua kali dari populasi kelompok etnis keturunan China (sebesar 16,8%). Tercakup dalam kelompok “ras lainnya” ini adalah berbagai kelompok etnis minoritas dan masyarakat adat seperti Iban, Murut, Dusun, Bisaya, Kedayan, Tutong, serta sebagian komunitas pribumi lainnya di wilayah pedalaman Brunei, terutama di distrik Temburong dan Belait.

Tabel 5. Status Penduduk Brunei Darussalam

Status Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentase
Warga Negara Brunei	351.700 jiwa	76,7%
Penduduk Tetap (Permanent)	26.500 jiwa	5,8%

²⁷ Matthew Ng Kok Ming, *Urban Growth in Brunei: The Interplay Between Policy, Land-use and Accessibility* (PhD Thesis, University College London, 2020).

Resident)		
Penduduk Sementara	80.400 jiwa	17,5%
Total	458.600 jiwa	100%

Sumber: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam (Proyeksi/Estimasi Penduduk).

Selain kategori berbasis etnisitas, pemilahan warga Brunei juga didasarkan pada status kewarganegaraan. Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Brunei berstatus sebagai warga negara penuh. Namun demikian, terdapat sekitar 26.500 penduduk tetap (*permanent resident*). Dalam konteks sosial-politik Brunei, penduduk tetap ini berasal dari kalangan warga keturunan China, yang meski telah tinggal selama beberapa generasi di Brunei tetapi belum memperoleh status kewarganegaraan penuh. Isu kewarganegaraan ini sering dikaitkan dengan kebijakan naturalisasi Brunei yang relatif ketat, termasuk persyaratan ujian bahasa Melayu dan proses administrasi yang panjang. Penduduk tetap menduduki kelas sosial kedua terendah dalam stratifikasi sosial masyarakat Brunei setelah pekerja migran. Status sosial tersebut tentunya berdampak terhadap kesenjangan sosial. Sehingga untuk mengantisipasi kesenjangan sosial tersebut perlu bagi Brunei mengonstruksi kebijakan pendidikan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial.²⁸ Dengan kebijakan pendidikan yang dikonteksikan dengan persoalan kesenjangan sosial di Brunei diharapkan berdampak pada kesejahteraan warga negara Brunei secara menyeluruh. Jika sistem pendidikan di Brunei memungkinkan mereka yang status sosialnya paling rendah dapat mengakses pendidikan yang membuat mereka memiliki kompetensi yang mumpuni, maka Brunei Darussalam dengan kebijakannya akan menjadi negara yang dapat mengantisipasi kesenjangan sosial sebagaimana negara-negara yang maju karena sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan.

Etnisitas, Status Kewarganegaraan dan Kesenjangan Akses Pendidikan

Selain tantangan berupa tingginya kelompok pemuda NEET, Brunei Darussalam juga menghadapi persoalan marginalisasi kelompok atau golongan tertentu. Meskipun lahir dan dibesarkan di Brunei Darussalam, sebagian orang keturunan etnis Cina menjadi penduduk tetap tanpa kewarganegaraan menurut hukum karena ayah mereka bukan warga negara Brunei sejak lahir.²⁹ Meski masih dapat bersekolah di sekolah negeri yang digratiskan untuk warga negara, warga keturunan Tionghoa dikenakan kewajiban membayar. Sebagian yang lain memilih bersekolah di lembaga pendidikan swasta, termasuk sekolah Tionghoa yang didirikan oleh komunitas Tiong Hwa yang menawarkan pendidikan bahasa Tionghoa. Warga Tionghoa yang bukan warga negara

²⁸ Mülle, "Citizenship and Social Stratification in Brunei Darussalam," 2020.

²⁹ H. Ho, "Culture, Education and Literature: How Are the Chinese Faring in Brunei Darussalam?" ARI Scope, 9 July 2023.

penyakit di Brunei terpinggirkan dalam bidang pendidikan. Anak-anak non-warga negara dikenakan biaya pendidikan menengah sebesar B\$140 (USD100) per bulan. Mahasiswa etnis Tionghoa yang tidak memiliki kewarganegaraan dan merupakan penduduk tetap harus membayar biaya tahunan sebesar B\$2.800 hingga B\$3.500 (2.000 hingga 2.500 dolar AS) untuk studi tingkat sarjana.³⁰

Selain warga keturunan Cina, warga di perkampungan tradisional dan etnis minoritas juga merasakan ketimpangan akses pendidikan. Warga Kampung Ayer, sebuah kampung tradisional di tengah kota Bander Seri Begawan dengan jumlah penduduk 10.250 jiwa (tahun 2016) dan dikenal sebagai daerah dengan tingginya konsentrasi kemiskinan, juga mengalami pengalaman kurang menyenangkan terkait layanan pendidikan. Kemiskinan mendorong anak-anak dari kampung ini terpaksa bekerja sejak usia dini, beberapa di antaranya bekerja paruh waktu di restoran untuk mendapatkan uang guna membeli kebutuhan sekolah dan berkontribusi pada biaya bulanan di rumah. Keadaan seperti itu menciptakan kondisi di mana anak-anak kesulitan untuk berprestasi di sekolah. Ada juga contoh di mana hanya dengan meninggalkan Kampung Ayer anak muda dapat memposisikan diri untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan untuk mobilitas sosial ke atas.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan yang tertuang dalam *Manpower Blueprint* bagi negara Brunei Darussalam yang menegaskan bahwa akses yang sama rata dan saksama kepada pendidikan dan latihan yang berkualitas belum termanifestasi di Kampung Ayer. Dalam artikel yang sama, juga diceritakan bagaimana warga miskin merasakan penolakan atas layanan pendidikan yang dijanjikan dan merasakan pengalaman traumatik yang membuat mereka memutus harapan untuk perbaikan kualitas hidup.

Tidak hanya di Kampung Ayer, anak-anak kampung etnis minoritas lain seperti Penan juga mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan. Anak-anak Penan memiliki prestasi akademik yang buruk dikarenakan tidak adanya dukungan yang membantu mereka untuk beradaptasi dengan penggunaan bahasa yang berbeda dalam instruksi pembelajaran. Separuh guru, dari daerah lain di Brunei, umumnya tidak tertarik untuk bekerja di sekolah tersebut (dan mereka tidak menerima orientasi mengenai sekolah atau lokasi tempat mereka ditempatkan) dan tidak dapat berbicara dalam bahasa setempat. Perpustakaan sekolah yang sangat kecil itu selalu dikunci, sehingga anak-anak memiliki akses yang sangat terbatas atau terkontrol atas sumber daya ini.³² Hambatan struktural ini menegaskan bahwa penanaman ekosistem pendidikan di wilayah pinggiran membutuhkan pendekatan yang tidak kaku, melainkan harus secara

³⁰ Seng Piew Loo, "Ethnicity and Educational Policies in Malaysia and Brunei Darussalam," *SA-eDUC Journal* 6, no. 2 (2009): 146–157.

³¹ N. H. Hassan et al., "Administering and Encountering the Poor," 311–331.

³² Peter G. Sercombe, "Language and Education," 625–635.

aktif membangun budaya literasi yang adaptif terhadap kearifan lokal serta latar belakang kultural masyarakat setempat.³³ Akibat tidak adanya sinkronisasi budaya tersebut, banyak anak Penan, khususnya anak perempuan, yang terpaksa putus sekolah lebih awal

Selain itu, prestasi anak-anak Penan tampaknya dipengaruhi oleh stereotip guru yang menganggap mereka sebagai kelompok nonkonformis yang terpinggirkan. Akibatnya, banyak anak Penan, khususnya anak perempuan, yang putus sekolah lebih awal. Masalah ketidakhadiran dan putus sekolah ini juga diperparah oleh alasan domestik. Orang tua mereka sering kali membutuhkan bantuan anak-anak untuk bekerja di pertanian subsisten.

Tabel 6. Pendaftaran berdasarkan ras dan kewarganegaraan menurut tingkat pendidikan, institusi, dan jenis kelamin untuk pendidikan tinggi.

Education Level	Gender	Race															
		Malay			Other Indigenous			Chinese			Others			Total			
		C	PR	NC	C	PR	NC	C	PR	NC	C	PR	NC	C	PR	NC	TOTAL
Higher Education	MF	7796	29	62	292	2	2	413	113	47	106	12	229	8607	156	340	9103
	M	3034	15	28	107	1	1	195	34	23	55	5	118	3391	55	170	3616
Total	F	4762	14	34	185	1	1	218	79	24	51	7	111	5216	101	170	5487
Year 1	MF	2182	8	19	74	0	0	107	30	5	9	4	65	2372	42	89	2503
	M	833	4	9	28	0	0	61	9	3	4	1	29	926	14	41	981
	F	1349	4	10	46	0	0	46	21	2	5	3	36	1446	28	48	1522
Year 2	MF	2834	14	25	135	1	2	177	50	30	73	5	90	3219	70	147	3436
	M	1097	6	9	49	0	1	81	17	14	40	3	49	1267	26	73	1366
	F	1737	8	16	86	1	1	96	33	16	33	2	41	1952	44	74	2070
Year 3	MF	1953	4	6	61	1	0	98	22	8	21	2	37	2133	29	51	2213
	M	775	2	5	23	1	0	38	7	4	11	0	17	847	10	26	883
	F	1178	2	1	38	0	0	60	15	4	10	2	20	1286	19	25	1330
Year 4	MF	733	3	12	22	0	0	28	11	4	3	1	33	786	15	49	850
	M	301	3	5	7	0	0	12	1	2	0	1	20	320	5	27	352
	F	432	0	7	15	0	0	16	10	2	3	0	13	466	10	22	498
Year 5	MF	88	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	90	0	2	92
	M	25	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	27	0	1	28
	F	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	63	0	1	64
Year 6	MF	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	7	0	2	9
	M	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	0	2	6
	F	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
UBD	MF	3507	19	13	225	2	2	276	99	35	41	11	52	4081	131	156	4368
	M	1182	8	3	81	1	1	108	28	15	15	4	19	1394	41	68	1503
	F	2325	11	10	144	1	1	168	71	20	26	7	33	2687	90	88	2865
Year 1	MF	771	4	0	50	0	0	64	22	3	9	4	27	894	30	30	954
	M	226	1	0	20	0	0	31	5	2	4	1	12	281	7	14	302
	F	545	3	0	30	0	0	33	17	1	5	3	15	613	23	16	652
Year 2	MF	1538	10	11	116	1	2	139	48	20	22	4	48	1815	63	81	1959
	M	548	4	3	44	0	1	56	16	7	7	2	23	655	22	34	711
	F	990	6	8	72	1	1	83	32	13	15	2	25	1160	41	47	1248
Year 3	MF	835	3	0	42	1	0	56	18	8	7	2	21	940	24	29	993
	M	265	1	0	14	1	0	15	6	4	4	0	8	298	8	12	318
	F	570	2	0	28	0	0	41	12	4	3	2	13	642	16	17	675
Year 4	MF	359	2	2	17	0	0	17	11	4	3	1	8	396	14	14	424
	M	142	2	0	3	0	0	8	1	2	0	1	5	151	4	7	162
	F	217	0	2	14	0	0	11	10	2	3	0	3	245	10	7	262
Year 5	MF	30	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	32	0	1	33
	M	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	0	8
	F	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0	1	25
Year 6	MF	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	5
	M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2
	F	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3

Sumber. Kementerian Pendidikan “Brunei Darussalam Education Statistics”
Tahun 2018

Kesenjangan akses pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor status kewarganegaraan dan etnisitas warganya itu makin nyata jika melihat data

³³ S. Ediyono dan A. Alfati, “Membangun Budaya Literasi Berbasis Kearifan Lokal,” *An-Nuha* 6, no. 2 (2019): 183–194.

statistik Pemerintah Brunei tentang pendaftaran mahasiswa di pendidikan tinggi seperti tabel 6 di atas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat dominasi kelompok Melayu dan warga negara (citizen/C) dalam akses pendidikan tinggi, sementara kelompok non-citizen (NC), permanent resident (PR), serta kelompok etnis minoritas memiliki representasi yang jauh lebih kecil. Tabel tersebut menunjukkan beberapa hal.

Pertama, dari sisi ras dan kewarganegaraan, kelompok Melayu mendominasi hampir seluruh *enrolment* pendidikan tinggi. Dari total 9.103 mahasiswa, sebanyak 8.607 merupakan citizen, dan mayoritas berasal dari etnis Melayu (warga negara dan etnisitas Melayu ini mencakup hampir 95% dari total mahasiswa). Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi sangat terkonsentrasi pada warga negara Melayu. Sebaliknya, kelompok “Others”, Chinese, dan terutama “Other Indigenous” memiliki jumlah yang jauh lebih kecil. Ketimpangan ini dapat mencerminkan struktur sosial Brunei yang menempatkan Melayu sebagai kelompok dominan melalui sistem Melayu Islam Beraja (MIB), yang berpengaruh terhadap distribusi kesempatan pendidikan dan kewarganegaraan.

Kedua, kesenjangan sangat terlihat pada status kewarganegaraan. Jumlah non-citizen (340 orang) dan PR (156 orang) sangat kecil dibanding citizen (8.607 orang). Bahkan pada kelompok Chinese dan Others, proporsi NC relatif tinggi dibanding kelompok Melayu. Ini menunjukkan bahwa sebagian komunitas etnis non-Melayu di Brunei masih berada dalam posisi kewarganegaraan yang tidak penuh atau rentan secara administratif. Status kewarganegaraan berpotensi memengaruhi akses terhadap beasiswa, subsidi pendidikan, dan peluang kerja setelah lulus, sehingga memperkuat stratifikasi sosial.

Ketiga, dari aspek gender, perempuan justru memiliki partisipasi lebih tinggi dibanding laki-laki. Total mahasiswa perempuan mencapai 5.487, sedangkan laki-laki hanya 3.616. Pola ini konsisten hampir di semua jenjang tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan di Brunei memiliki akses pendidikan tinggi yang relatif baik, bahkan melampaui laki-laki. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan kebijakan pendidikan yang inklusif terhadap perempuan, sekaligus mencerminkan perubahan sosial di mana perempuan semakin aktif mengejar pendidikan tinggi dan mobilitas sosial. Namun demikian, jika gender dikaitkan dengan ras dan kewarganegaraan, kesenjangan tetap muncul. Perempuan yang dominan tetap sebagian besar berasal dari kelompok citizen Melayu. Sementara perempuan dari kelompok non-citizen dan etnis minoritas jumlahnya sangat kecil. Artinya, keuntungan pendidikan perempuan tidak tersebar merata, melainkan lebih banyak dinikmati oleh kelompok mayoritas yang memiliki status kewarganegaraan penuh.

Data Universiti Brunei Darussalam (UBD) juga memperlihatkan pola yang sama. Dari total 4.368 mahasiswa UBD, sebagian besar merupakan citizen Melayu, sementara PR dan NC tetap minoritas. Ini menunjukkan bahwa universitas utama negara cenderung mereproduksi struktur sosial nasional. Dengan demikian, pendidikan tinggi di Brunei tampak relatif inklusif dari segi gender, tetapi masih menunjukkan eksklusivitas berdasarkan etnis dan status kewarganegaraan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan menempati posisi strategis dalam pembangunan Brunei Darussalam melalui kerangka Wawasan Brunei 2035. Pemerintah menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama pengembangan sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan gratis, penguatan pendidikan tinggi, pengembangan STEM, serta berbagai program pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam mendukung pembangunan manusia dan transformasi ekonomi nasional.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan akses dan kesempatan pendidikan. Kelompok etnis minoritas, penduduk tetap (permanent resident), non-citizen, serta masyarakat di wilayah pinggiran masih menghadapi berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan administratif yang memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan di Brunei belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial yang inklusif.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Brunei Darussalam telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan kesempatan bagi seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif agar tujuan pembangunan manusia dan pengurangan kesenjangan sosial dalam Wawasan Brunei 2035 dapat tercapai secara lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. *Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Widina Media Utama. (2025)
- Afifah, A. P. N, Setyowati, W. E., & Febriana, B. *Hubungan Antara Tingkat Kemandirian Dengan Self-Adjustment Pada Mahasiswa Rantau*. SANITAS Jurnal Studi Kesehatan, Medis, dan Psikologis, Vol. 1(2) (2025).
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5965040>

- Aisyah, SN, & Fauzan, A. Ketimpangan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2 (3) (2024): 120-126. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v2i3.409>
- Ambari, A. A. F., Ludiawati, S. S., Fauzia, F., Hidayat, R., & Purrohman, P. S. Kesenjangan Sosial dan Dampaknya pada Stabilitas Ekonomi. Dalam *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 3 (2) (2025).
- Ananda, Rizki, Widia Intan Syaputri, Tari Suhesni, dan Nabillah Rossadah. "Perbandingan Pendidikan di Indonesia dan Pendidikan di Finlandia." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 6689–6694.
- ASEAN. Investing in ASEAN. West Sussex: Allurentis. (2023).
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi ditengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Penerbit Kencana. (2019)
- Berry, A., & Serieux, J. Riding the Elephants: the Evolution of World Economic Growth and Income Distribution at the End of Twentieth Century (1980-2000). *DESA Working Paper* No. 27, September 2006. https://www.un.org/esa/desa/papers/2006/wp27_2006.pdf.
- Black, A. E. Ideology and Law: the Impact of MIB Ideology on Law and Dispute Resolution the Sultanate of Brunei Darussalam. Dalam *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 3(1) (2008): 1-41. DOI: <https://doi.org/10.1017/S2194607800000168>.
- Black, A. E. Matching to the Beat of Different Drum: Royalty, Women, and Ideology in the Sultanate of Brunei Darussalam. Dalam *Royal Studies Journal*, Vol. 7(2) (2020): 94-116.
- Black, A. E. Through an Islamic Lens: Inequalities in Brunei's Personal Status Laws. Dalam *Equality, Plurality, and Personal Status Laws: Research Companion*, eds. Nathalie Bernard-Maugiron, Baudouin Dupret, Jean-Luis Halperin, Radhika Kanchana, Ayang Utriza Yakin, and Zohra Aziade Zemirli. London: Routledge. 2026.
- Blackburn, R. M. What is Social Inequality. Dalam *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 28 (7-8) (2008): 250-259. <http://dx.doi.org/10.1108/01443330810890664>

- Carroll, T. The Political Economy of Southeast Asia's Development from Independence to Hyperglobalization. Dalam *The Political Economy of Southeast Asia: Politics and Uneven Development under Hyperglobalization*, eds. Toby Carroll, Shahar Hameiri, & Lee Jones. Switzerland: Palgrave MacMillan. 2020.
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. *World Inequality Report 2022*. World Inequality Lab. 2021.
- Ediyono, S., & Alfiati, A. "Membangun Budaya Literasi Berbasis Kearifan Lokal." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Vol. 6(2) (2019): 183–194
- Freeman, B., Marginson, S., & Tytler, R. "An International View of STEM Education." In *Myth and Truths: What Has K-12 STEM Education Research Taught Us*, eds. Alpaslan Sahin & Margaret J. Morhr-Schroeder, 350-363. Leiden: Brill. (2019).
- Gemini AI. *Brunei dalam Frame Nusantara: Sebuah Permata di Jantung Borneo*. Infografis Digital. Google Gemini, 2026.
- Gemini_Generated_Image_84wtbe84wtbe84wt.png.
- Ghifari Dimas Bayu Patra, Nuraini, I., & Fudin, MK. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Beberapa Negara ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6(3) (2022): 409-420, <https://doi.org/10.22219/jie.v6i3.21623>.
- Grigoryev, L, & Pavlyushina, V. Relative Social Inequality in the World: Rigidity Against the Economic Growth, 1992–2016. *Russian Journals Economics*, Vol. 5(1) (2019): 46-66, <https://doi.org/10.32609/j.ruje.5.35485>.
- Han, X., & Appelbaum, R. A. China's Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Research Environment: A Snapshot. *PLoS ONE*, Vol. 13(4) (2018), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195347>.
- Hanan, Abiyyu Arhab, Gibran Andika Pratama, dan Taufik Muhtarom. "Perbedaan Sistem Pendidikan di Singapura dengan Indonesia Seiring Perkembangan Zaman." *JUPERAN: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 2 (2023): 262–270.

- Ho, H. *Culture, Education and Literature: How are the Chinese faring in Brunei Darussalam?* <https://ari.nus.edu.sg/ariscopes/culture-education-and-literature-how-are-the-chinese-faring-in-brunei-darussalam/>. (9 July 2023).
- Hasibuan, A. T., Simatupang, W. W. S., Rudini, R., & Ani, S. Implementasi Sistem Pendidikan Terbaik Dunia Di Jenjang Anak Usia Dasar Telaah Sistem Pendidikan Finlandia. Dalam *Jurnal Pembelajaran dan Matematika Sigma*, Vol. 9(1) (2023).
- Horn, G. A., Dröge, K., Sturn, S., van Treeck, T., and Zwiener, R. From the Financial Crisis to the World Economic Crisis: The role of Inequality. *IMK Policy Brief*, No. October 2009. Hans-Böckler-Stiftung, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Düsseldorf. <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-20091104943>
- Huq, M. T., & Ichihashi, M. Can Historical Economic Growth Patterns be Traced in South and Southeast Asian Countries as the Classical Theory Suggests?. Dalam *Journal of Economic Structures*, Vol. 14(11) (2025), <https://link.springer.com/article/10.1186/s40008-025-00355-4>.
- Iswadi. *Gagasan Pendidikan Membangun Peradaban Berintegritas*. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2026.
- Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES). *Brunei Darussalam Statistical Yearbook*. Kementerian Kewangan dan Ekonomi, 2025.
- Jacob, M., & Klein, M. Social Origin, Field of Study and Graduates' Career Progression: Does the Effect of Social Origin Vary Across Fields?. *The British Journal of Sociology*, Vol. 70(5) (2019), <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12696>.
- Kementerian Kewangan dan Ekonomi Brunei Darussalam. *Towards a Dynamic and Sustainable Economic Blueprint For Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: Kementerian Kewangan dan Ekonomi, 2020.
- Kementerian Pendidikan. *Brunei Darussalam Education Statistics*. 2019
- King, V. T., & Druce, S. C. Brunei Darussalam: A Celebration and Evaluation of the Work Professor Donald E. Brown. Dalam *Origins, History, and Social Structure in Brunei Darussalam*, eds. Victor T. King and Stephen C. Druce. New York: Routledge. 2021.
- Kuhlthau, C. C. *Teaching the Library Research Process*. Lanham: The Scarecrow Press. 2002.
- Krugman, P. *The Conscience of a Liberal: Reclaiming America from the Right*. New York: W. W. Norton & Co, 2009.
- Lisa, M., & Sahrudin, F. M. Singapore to be World's Richest Country by 2025, overtaking Luxembourg. *IDN Financials*. December 12, 2025.

- <https://www.idnfinancials.com/news/59521/singapore-to-be-worlds-richest-country-by-2025-overtaking-luxembourg>
- Majlis Tertinggi Wawasan Brunei. *Laporan Wawasan Brunei 2035: 2015-2022*. Bandar Seri Begawan: Majlis Tertinggi Wawasan Brunei. 2023.
- McKay, S. & Rowlingson, K. "The Religion of Inequality." In *A Manifesto for the Public University*, eds. John Holmwood, 90-111. London: Bloomsbury Academic. 2011.
- Ministry of Education (MOE) & Manpower Planning and Employment Council (MPEC). *Manpower Blueprint Bagi Negara Brunei Darussalam*. Kementerian Pendidikan. 2023.
- Mubarok, N. Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. Dalam *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, Vol. 1 (1) (2021): 126–155, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.66>
- Ng, M. *Urban Growth in Brunei: the Interplay between Policy, Land-use, and Accessibility*. Thesis at University College London. 2020.
- Hassan, N. H., Rigg, J., Yong, G. Y. V., Azalie, I. A., Shamsul, M. A. S. M., and Zainuddin, N. H.. Administering and encountering the poor: Poverty from above and below in Brunei Darussalam. Dalam *Singapore Journal of Tropical Geography*, Vol. 45(2) (2024): 311-331. <https://doi.org/10.1111/sjtg.12545>
- Loo, S. P. Ethnicity and educational policies in Malaysia and Brunei Darussalam. *SA-eDUC Journal*, Vol. 6(02) (2009): 146-157.
- Ravi, K., Rhee, C., & Zhuang, J. "Introduction." In *Inequality in Asia And The Pacific: Trends, Drivers, And Policy Implications*, eds. Ravi, K., Rhee, C., & Zhuang, J., 1-18. London: Routledge.
- Rahma, Habibburrahman, Ahmad Mauluddin, dan Rizki Ananda. "Comparative Study of Basic Education in Indonesia and Finland." *Jurnal Pendidikan IPS* 14, no. 1 (2024).
- Robertson, S. L. Piketty, Capital and Education: a Solution to, or Problem in, Rising Social Inequalities?. *The British Journal of Sociology of Education*, Vol. 37 (2016): 823-835, <https://doi.org/10.1080/01425692.2016.1165086>
- Sahrudin Fiqri M, Lisa Monica. Singapura Negara Terkaya Dunia 2025, Lewati Luksemburg. <https://www.idnfinancials.com/id/news/59521/singapura-negara-terkaya-dunia-2025-lewati-luksemburg>

- Searing, S. E. *Introduction to Library Research in Women's Studies*. London: Routledge. 1985.
- Sekretariat Tetap Wawasan Brunei 2035. *Wawasan Brunei 2035: Wawasan Negaraku*. Bandar Seri Begawan: Sekretariat Tetap Wawasan Brunei 2035. 2020.
- Sercombe, P. G. Language and education: The experience of the Penan in Brunei. *International Journal of Educational Development*, Vol. 30 (2010): 625-635. doi:10.1016/j.ijedudev.2010.05.001
- Syakhrani, A. W., Bahrianti, Dewi, Mahmudah, Rahmadina, E. Sistem Pendidikan di Negara Cina. *ADIBA: Journal of Education*, Vol. 2(3) (2022): 413-420.
<https://adisampublisher.org/index.php/adiba/article/view/161/163>
- Teo, T. W., & Choy, B. H. STEM Education in Singapore. Dalam *Singapore Math and Science Education Innovation: Empowering Teaching and Learning Through Policies and Practice*, eds. Tan, O.S., Low, E. L., Tay, E. G., & Yan, Y. K. Singapore: Nanyang Technological University. 2021.
- United Nations Development Programme (UNDP). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock - Reimagining cooperation in a polarized world*. UNDP. (2024).
- Tibok, R. P., & Hiew. W. Higher Education Systems and Institutions, Brunei Darussalam. Dalam *The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions*, eds. Pedro Nuno Teixeira dan Jung-Sheol Chin. London: Springer Nature. 2019.
- Wade, R. H. Income Inequality: Should We Worry about Global Trends?. Dalam *European Journal of Development Research*, Vol. 23 (2011): 513-520, doi:10.1057/ejdr.2011.24.
- World Bank. Government expenditure on education, total (% of GDP) - East Asia & Pacific [Data set]. World Bank Open Data. (2025).
- World Bank. *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality*. Washington DC: World Bank. 2016. doi:10.1596/978-1-4648-0958-3.
- World Bank. *Share of youth not in education, employment or training, total (% of youth population)—Brunei Darussalam*.
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?locations=BN>